

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Administrasi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (disingkat NTB) merupakan salah satu provinsi dari Republik Indonesia yang terletak pada sebelah barat kepulauan Nusa Tenggara. Secara astronomis Nusa Tenggara Barat terletak pada $115^{\circ} 46'$ - $119^{\circ} 5'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 10'$ - $9^{\circ} 5'$ Lintang Selatan. Terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok pada sebelah Barat dan Pulau Sumbawa pada bagian Timur. Secara garis waktu, Nusa Tenggara Barat masuk pada bagian Indonesia bagian Tengah yang memiliki selisih satu jam lebih cepat dari Indonesia bagian barat. Secara geografis memiliki batas-batas Utara-Laut Jawa dan Laut Flores; Selatan – Samudera Hindia; Barat-Selat Lombok dan Provinsi Bali; Timur – Selat Sape dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat terdiri dari 421 pulau dan yang dihuni sekitar 40 pulau (Pemerintah Provinsi NTB).

Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.426,20 km² (76,50 %) atau 2/3 dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan luas Pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja. Pusat pemerintahan Provinsi NTB terdapat di Kota Mataram Pulau Lombok. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 mdpl sementara Taliwang terendah dengan 11 mdpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl.

Sebelum disahkan pada 1958 melalui UU Nomor 64 tahun 1958 untuk menjadi provinsi sendiri, Nusa Tenggara Barat secara administratif berada pada wilayah Negara Indonesia Timur pasca konferensi meja bundar pada tahun 1949. Pasca pengakuan kedaulatan, Nusa Tenggara Barat masuk dalam provinsi Sunda Kecil yang terdiri dari 3 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ketiganya sekarang telah menjadi wilayah administrasi masing-masing.

Secara administratif, sekarang Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan dua kota yang terletak pada dua pulau besar, Sumbawa dan Lombok.

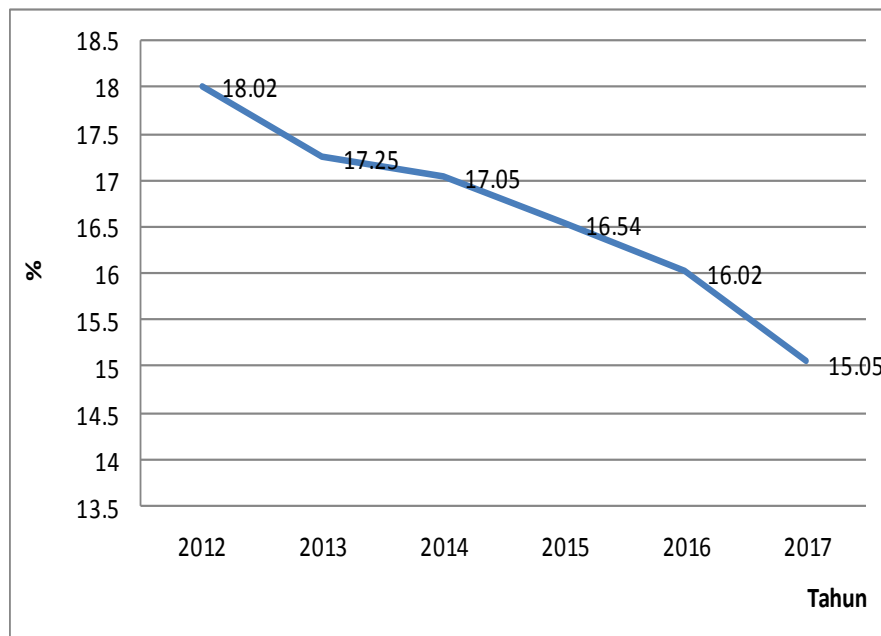
- a. Lombok : Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Utara
- b. Sumbawa : Kota Bima, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat dan Dompu

2. Gambaran Umum Variabel Penelitian.

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketika seorang individu tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya yang menjadikan ia bermartabat. Kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, air bersih, petanahan dan lain lain yang menjadikan ia tidak bermartabat karena tidak bisa memenuhi hak-hak dasarnya. Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah melakukan pembangunan ekonomi. Selama kurun waktu tahun 2012-2017, angka presentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat menurun. Dalam kurun

waktu tersebut, secara presentase angka kemiskinan menurun sebanyak 3,45%. Berikut angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2012-2017 :

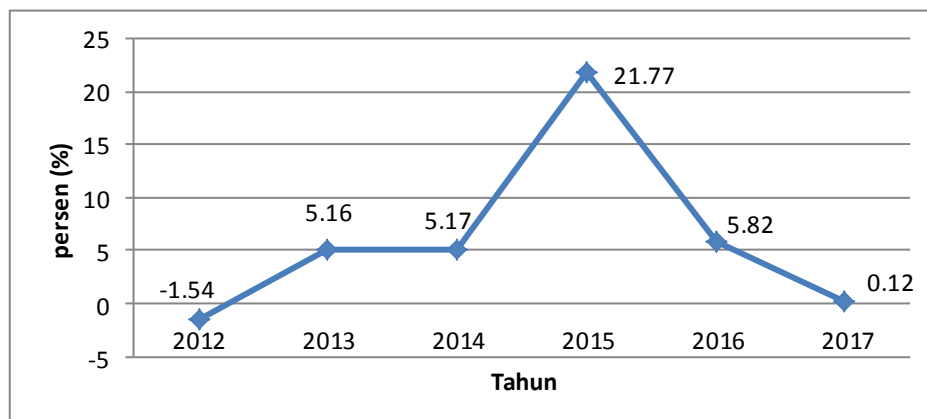


Sumber : BPS NTB (data diolah)

Gambar 4.1 Presentase Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2012-2017

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator dari perekonomian suatu daerah. Tingginya pertumbuhan ekonomi seharusnya menjadi satu pembuka lapangan pekerjaan. Sebaliknya, rendahnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah akan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan dan tidak terserapnya angkatan kerja pada suatu daerah. Ketika angkatan kerja dalam keadaan menganggur, tentu mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan menyebabkan masalah kemiskinan.



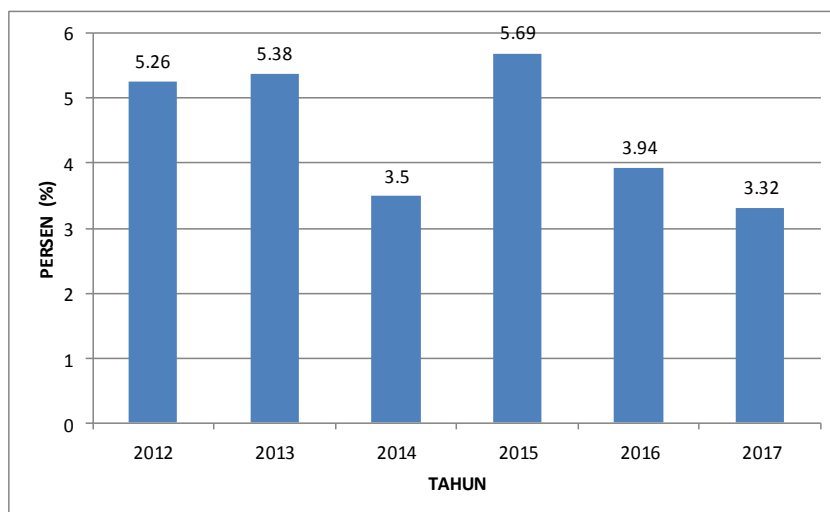
Sumber : BPS (data diolah)

Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2012 – 2017

Menurut dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlihat dalam gambar 4.2 bahwa laju pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif. Artinya, pemerintah tidak memiliki tren menanjak dalam 5 tahun kebelakang dan cenderung tidak stabil. Keadaan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dari tahun ke tahun menyebabkan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

c. Pengangguran

Dari segi ekonomi, ketidakmampuan pasar dalam menyerap angkatan kerja akan menyebabkan pengangguran. Dilain sisi, faktor-faktor seperti PHK oleh perusahaan, kondisi keamanan yang kurang kondusif dan lain-lain. Tidak seimbangnya permintaan antara angkatan kerja dan lapangan kerja menyebabkan angka pengangguran cenderung fluktuatif.



Sumber : BPS NTB (data diolah)

Gambar 4. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat 2012 – 2017

Angka pengangguran terbuka di provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 angka pengangguran terbuka menyentuh 5,12 persen dan naik pada tahun 2013 menjadi 5,38%. 2014 menjadi 3,50%. Pada tahun 2015 angkanya menjadi 5,69% disusul tahun 2016 turun menjadi 3,94%. Ditahun 2017 angka pengangguran terbuka semakin mengecil menjadi 3,32%.

d. Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan sebuah indikator dalam penilaian dan capaian pendidikan pada suatu daerah tertentu. Angka partisipasi sekolah dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Pada usia 7-12 tahun merupakan jenjang untuk sekolah dasar. Umur 13-15 tahun merupakan jenjang untuk sekolah menengah pertama secara normal. Pada penelitian ini, penulis mengambil jenjang umur dari 16-18 tahun, yaitu setara dengan sekolah menengah atas. Syarat administratif

yang kian kompleks pada beberapa pekerjaan menjadi pertimbangan tersendiri, mengingat angka partisipasi sekolah menjadi tolak ukur pendidikan.

Tabel 4. 1
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2012 – 2017

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lombok Barat	67,94	59,84	67,80	72,10	70,92	75,80
Lombok Tengah	57,16	55,26	64,79	73,98	71,59	72,91
Lombok Timur	66,72	70,91	70,26	78,64	76,24	75,35
Lombok Utara	64,21	70,52	53,16	51,58	65,73	67,40
Sumbawa	62,47	67,68	77,21	67,61	75,24	73,62
Sumbawa Barat	74,83	68,04	76,09	73,01	86,55	81,20
Bima	69,94	70,57	81,89	82,27	82,27	87,07
Dompu	58,26	69,44	81,35	89,53	81,86	76,47
Kota Mataram	74,99	76,51	75,68	80,86	85,38	79,21
Kota Bima	74,83	74,40	91,09	79,70	87,55	85,25
Dalam satuan persen (%)						

Sumber : BPS NTB.

Dalam tabel 4.1 terkait angka partisipasi sekolah yang mengambil kelompok umur 16 -18tahun terjadi keadaan yang cenderung fluktuatif. Dihitung dari periode tahun 2012 – 2017, maka dapat diketahui bahwa Lombok Tengah yang tadinya menempati urutan terakhir pada tahun 2012, selama 5 tahun hingga tahun 2017 berhasil mengalami tren yang positif dan tidak menjadi kabupaten dengan angka partisipasi sekolah yang rendah. Rata-rata kenaikan terkecil dan sangat fluktuatif adalah di kabupaten Lombok Utara, yang pada tahun 2017 menempati posisi terendah. Angka tertinggi justru ditempati oleh Kabupaten dan Kota Bima terkait angka partisipasi sekolah kelompok umur 16-18 tahun.